



Kesejahteraan Dan Profesionalisme Guru PAUD Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Di TK Nagari Koto Anau Tapan

Windi Elsa Putri¹, Zahra Tsabita Putri², Delfi Eliza³

Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat

Email: windielsaputri18@gmail.com¹, zahratsabitaputri25@gmail.com²,

delfieliza@fip.unp.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD), khususnya di daerah terpencil, yang berpotensi memengaruhi profesionalisme serta kualitas pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme guru dan dukungan kesejahteraan yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan guru, praktik etika profesi, serta implementasi regulasi pendidikan pada guru PAUD di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Objek penelitian meliputi kesejahteraan, profesionalisme, dan implementasi regulasi guru PAUD, sedangkan subjek penelitian terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah di TK Nagari Koto Anau Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru masih rendah, dengan kisaran gaji sebesar Rp300.000–Rp500.000 per bulan yang belum mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun demikian, guru tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi dan mempertahankan profesionalisme dalam proses pembelajaran. Selain itu, implementasi regulasi pendidikan belum dirasakan secara optimal, terutama bagi guru honorer di daerah terpencil. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru PAUD sehingga diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di daerah terpencil.

Kata kunci: Kesejahteraan Guru, Profesionalisme, PAUD, Studi Kasus, Regulasi Pendidikan

Abstract: This study is motivated by the low level of welfare among early childhood education (ECE) teachers, particularly in remote areas, which has the potential to affect professionalism and the quality of learning. This condition indicates a gap between the demands of teacher professionalism and the limited welfare support available. This study aims to analyze teachers' welfare conditions, professional ethics practices, and the implementation of educational regulations among ECE teachers in remote areas. This study employed a qualitative approach with a case study design. The objects of the study included teacher welfare, professionalism, and the implementation of regulations for ECE teachers, while the research subjects consisted of ECE teachers and the principal of TK Nagari Koto Anau Tapan, Pesisir Selatan Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and then analyzed using an interactive analysis model. The results showed that teachers' welfare remains low, with salaries ranging from IDR 300,000 to IDR 500,000 per month, which are insufficient to meet living needs. Nevertheless, teachers continue to demonstrate high dedication and maintain professionalism in the learning process. In addition, the implementation of educational regulations has not been optimally experienced, especially by honorary teachers in remote areas. The conclusion of this study indicates a gap between the demands of professionalism and the welfare of ECE teachers, highlighting the need for more contextual and equitable policies to improve teacher welfare, particularly in remote areas.

Keywords: Teacher Welfare, Professionalism, Early Childhood Education (ECE), Case Study, Educational Regulations

A. Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam perkembangan individu, khususnya dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral (Lestari et al., 2022). Pada fase ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga membutuhkan stimulasi yang tepat dan berkualitas (Julaiha et al., 2023). Guru PAUD memiliki peran strategis sebagai fasilitator utama dalam proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar kehidupan (Eliza et al., 2022). Oleh karena itu, kualitas guru PAUD menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak usia dini.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa profesi guru PAUD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesejahteraan. Kesejahteraan guru menjadi isu krusial karena berhubungan langsung dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja profesional guru. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan keterlibatan guru dalam proses pendidikan (Fasya et al., 2024; Safitri & Ahyani, 2024). Selain itu, guru PAUD, khususnya yang berstatus honorer, sering kali menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Aulia et al., 2023; Fatria et al., 2022; Nuria & Aprilianti, 2023).

Permasalahan kesejahteraan guru PAUD semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi daerah. Guru PAUD yang berada di daerah terpencil cenderung menghadapi keterbatasan yang lebih besar dibandingkan dengan guru di wilayah perkotaan, baik dari segi akses terhadap fasilitas pendidikan, pelatihan, maupun dukungan kebijakan (Na'imah et al., 2021; Purba et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di sisi lain, guru PAUD tetap dituntut untuk menjalankan profesionalisme dan etika profesi dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme guru mencakup kemampuan pedagogik, kompetensi profesional, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap profesi (Mia & Sulastri, 2023; Sutiono, 2021). Selain itu, etika profesi guru menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, yang mencakup komitmen, integritas, dan tanggung jawab terhadap peserta didik (Jamil, 2022). Dalam praktiknya, guru PAUD sering dihadapkan pada dilema antara tuntutan profesionalisme yang tinggi dan kondisi kesejahteraan yang terbatas.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional (Indonesia, 2003). Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur hak guru untuk memperoleh penghasilan yang layak serta jaminan kesejahteraan (Indonesia, 2005). Namun, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil (Hidayat & Albab, 2023).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas kesejahteraan dan profesionalisme guru, tetapi sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik menggambarkan kondisi nyata di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai kesejahteraan, profesionalisme, dan implementasi regulasi guru PAUD dalam konteks daerah.

Penelitian ini dilakukan di TK Nagari Koto Anau Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan salah satu lembaga PAUD swasta di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan guru PAUD, praktik etika profesi, serta implementasi regulasi pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan berkeadilan, khususnya bagi guru PAUD di daerah terpencil.

B. Landasan Teori

1. Kesejahteraan Guru PAUD

Kesejahteraan guru PAUD merupakan kondisi holistik yang mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan profesional. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga mencakup kepuasan kerja, stabilitas emosional, serta dukungan lingkungan kerja. Rendahnya kesejahteraan dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan kinerja guru (Fasya et al., 2024).

Berdasarkan teori kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh (Maslow, 1943), pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman, menjadi fondasi bagi individu untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks guru PAUD, kesejahteraan yang rendah dapat menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga berdampak pada motivasi dan kinerja guru.

Selain itu, kesejahteraan guru juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti beban kerja dan tekanan profesional. Kondisi ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan emosional yang berdampak pada kualitas pembelajaran (Oducado et al., 2024).

2. Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merupakan kemampuan dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pendidik secara optimal. Profesionalisme mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang harus dimiliki oleh guru (Mia & Sulastri, 2023).

Selain itu, profesionalisme juga berkaitan dengan sikap tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap profesi (Mia & Sulastri, 2023). Guru PAUD dituntut untuk mampu menjaga kualitas pembelajaran meskipun berada dalam kondisi yang terbatas.

3. Etika Profesi Guru

Etika profesi guru merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Etika profesi mencakup prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen terhadap peserta didik (Jamil, 2022).

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, etika profesi menjadi landasan penting dalam membentuk karakter anak serta menjaga kualitas interaksi antara guru dan peserta didik.

4. Regulasi Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Regulasi pendidikan di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional (Indonesia, 2003). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan jaminan hak bagi guru untuk memperoleh penghasilan yang layak (Indonesia, 2005).

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil (Hidayat & Albab, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang dialami oleh guru PAUD, khususnya terkait kesejahteraan, profesionalisme, dan implementasi regulasi dalam konteks nyata. Desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara komprehensif kondisi yang terjadi di satu lokasi tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang kontekstual dan mendalam.

Lokasi penelitian ini adalah TK Nagari Koto Anau Tapan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan PAUD swasta yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya sehingga relevan untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru PAUD. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026.

Objek penelitian meliputi kesejahteraan, profesionalisme, dan implementasi regulasi guru PAUD, sedangkan subjek penelitian terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah guru yang memiliki pengalaman mengajar minimal tiga tahun serta kepala sekolah yang memahami kondisi kelembagaan dan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, salah satu informan utama adalah guru PAUD yang memiliki pengalaman mengajar selama enam tahun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait kondisi kesejahteraan guru, praktik profesionalisme, serta persepsi terhadap regulasi pendidikan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan sekolah, fasilitas pembelajaran, serta interaksi antara guru dan peserta didik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui

wawancara dan observasi, seperti data jumlah guru, jumlah siswa, serta informasi terkait pengelolaan sekolah.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul data sekaligus analisis data. Selain itu, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan lembar observasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kedalaman data yang dikumpulkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antardata. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk memperoleh temuan penelitian yang bermakna.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kajian teori dan regulasi terkait kesejahteraan dan profesionalisme guru. Penyusunan instrumen mengacu pada konsep kebutuhan manusia dari (Maslow, 1943) yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dalam mendukung kinerja individu. Selain itu, instrumen juga mempertimbangkan standar pendidikan global dari UNESCO (2015) dan World Bank (2018), serta regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur hak dan kesejahteraan guru (Indonesia, 2005).

Berdasarkan landasan tersebut, instrumen wawancara dikembangkan ke dalam beberapa aspek utama yang meliputi kesejahteraan guru, etika profesi, regulasi, reflektif, dan kondisi lembaga. Adapun kisi-kisi instrumen wawancara disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Instrumen Wawancara

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
Guru			
1.	Kesejahteraan Guru	Gaji	Berapa kisaran gaji yang diterima setiap bulan?
		Kecukupan ekonomi	Apakah gaji mencukupi kebutuhan sehari-hari?
		Pekerjaan tambahan	Apakah memiliki pekerjaan tambahan?
		Tunjangan	Apakah menerima tunjangan dari pemerintah?
		Persepsi kesejahteraan	Bagaimana pendapat tentang kesejahteraan guru PAUD?
2.	Etika Profesi	Makna profesi	Apa makna menjadi guru PAUD?
		Profesionalisme	Bagaimana menjaga profesionalisme dalam mengajar?

		Tantangan kerja	Apa tantangan terbesar sebagai guru?
		Pengaruh kesejahteraan	Apakah kesejahteraan mempengaruhi semangat mengajar?
		Komitmen profesi	Mengapa tetap bertahan menjadi guru PAUD?
3.	Regulasi	Pemahaman kebijakan	Apakah mengetahui UU Guru dan Dosen?
		Implementasi kebijakan	Apakah manfaat regulasi sudah dirasakan?
		Program pemerintah	Apakah ada program pemerintah yang membantu?
		Harapan kebijakan	Bagaimana harapan terhadap kebijakan pemerintah?
4.	Reflektif	Harapan profesi	Apa harapan terhadap profesi guru PAUD ke depan?
		Perbaikan sistem	Apa yang perlu diperbaiki dari sistem saat ini?
Kepala Sekolah			
5.	Kondisi Lembaga	Profil sekolah	Bagaimana kondisi umum sekolah?
		SDM	Berapa jumlah guru dan siswa?
		Pendanaan	Apa sumber utama pendanaan sekolah?
6.	Kesejahteraan Guru (KS)	Sistem gaji	Bagaimana sistem penggajian guru?
		Kendala gaji	Apa kendala dalam memberikan gaji layak?
		Bantuan	Apakah ada bantuan pemerintah?
7.	Regulasi (KS)	Implementasi	Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah?
		Dukungan dinas	Apakah ada dukungan dari dinas pendidikan?
		Kendala	Apa kendala penerapan regulasi?
8.	Profesionalisme	Etika guru	Bagaimana etika dan dedikasi guru?
		Dampak kesejahteraan	Apakah kesejahteraan mempengaruhi kualitas pembelajaran?

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap aspek penelitian dijabarkan ke dalam indikator dan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali data secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Aspek kesejahteraan guru difokuskan pada kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, aspek etika profesi menggambarkan komitmen dan profesionalisme guru, sedangkan aspek regulasi mengkaji pemahaman serta implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu, aspek reflektif digunakan untuk mengetahui harapan guru terhadap profesi, dan aspek kondisi lembaga memberikan gambaran kontekstual terkait lingkungan kerja guru.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari

berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai kondisi kesejahteraan, profesionalisme, dan implementasi regulasi guru PAUD di daerah terpencil. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami realitas yang dialami oleh guru secara lebih kontekstual dan komprehensif.

D. Kesejahteraan Dan Profesionalisme Guru PAUD Di Daerah Terpencil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah di TK Nagari Koto Anau Tapan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait kondisi kesejahteraan guru, praktik profesionalisme, serta implementasi regulasi pendidikan di daerah terpencil.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kesejahteraan, etika profesi, regulasi, reflektif, dan kondisi lembaga. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan temuan dan makna untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil wawancara dengan guru disajikan pada Tabel 2, sedangkan hasil wawancara dengan kepala sekolah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Hasil Wawancara Guru

Aspek	Temuan	Makna
Kesejahteraan	Gaji Rp300.000–Rp500.000/bulan, tidak mencukupi kebutuhan	Kesejahteraan ekonomi rendah
	Memiliki pekerjaan tambahan (berkebun & berjualan)	Strategi bertahan hidup
	Tunjangan tidak rutin	Ketidakpastian pendapatan
Etika Profesi	Menganggap guru sebagai panggilan hati	Dedikasi intrinsik tinggi
	Tetap profesional (datang tepat waktu, menyiapkan pembelajaran)	Komitmen kerja
	Menghadapi keterbatasan fasilitas	Hambatan struktural
	Tetap semangat meski kesejahteraan rendah	Resiliensi guru
Regulasi	Mengetahui UU tetapi belum memahami detail	Literasi kebijakan rendah
	Manfaat regulasi belum dirasakan	Implementasi belum optimal
	Bantuan belum merata	Ketimpangan kebijakan
Reflektif	Harapan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan	Aspirasi terhadap keadilan profesi
	Perlu peningkatan gaji & pemerataan bantuan	Kebutuhan sistemik

Tabel 3. Hasil Wawancara Kepala Sekolah

Aspek	Temuan	Makna
Kesejahteraan	Gaji Rp300.000–Rp500.000/bulan, tidak mencukupi kebutuhan	Kesejahteraan ekonomi rendah
	Memiliki pekerjaan tambahan (berkebun & berjualan)	Strategi bertahan hidup
	Tunjangan tidak rutin	Ketidakpastian pendapatan
Etika Profesi	Menganggap guru sebagai panggilan hati	Dedikasi intrinsik tinggi
	Tetap profesional (datang tepat waktu, menyiapkan pembelajaran)	Komitmen kerja
	Menghadapi keterbatasan fasilitas	Hambatan struktural
	Tetap semangat meski kesejahteraan rendah	Resiliensi guru
Regulasi	Mengetahui UU tetapi belum memahami detail	Literasi kebijakan rendah
	Manfaat regulasi belum dirasakan	Implementasi belum optimal
	Bantuan belum merata	Ketimpangan kebijakan
Reflektif	Harapan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan	Aspirasi terhadap keadilan profesi
	Perlu peningkatan gaji & pemerataan bantuan	Kebutuhan sistemik

Tabel 2 menunjukkan bahwa kesejahteraan guru masih berada pada tingkat rendah yang ditandai dengan gaji yang belum mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, guru tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi meskipun berada dalam kondisi yang terbatas. Sementara itu, Tabel 3 menunjukkan bahwa, dari perspektif kepala sekolah, keterbatasan kesejahteraan guru dipengaruhi oleh kondisi lembaga yang bergantung pada jumlah siswa dan sumber pendanaan yang terbatas.

Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu kondisi kesejahteraan guru, praktik etika dan profesionalisme, kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta implikasi kesejahteraan terhadap kualitas pembelajaran. Setiap temuan diinterpretasikan secara kritis dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis.

1. Kesejahteraan Guru PAUD yang Masih Rendah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAUD di TK Nagari Koto Anau Tapan masih tergolong rendah. Guru menerima gaji berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan yang bergantung pada kondisi keuangan sekolah. Pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga guru harus mencari pekerjaan tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAUD di daerah masih berada pada kategori yang memprihatinkan.

Rendahnya kesejahteraan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pendanaan sekolah, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan PAUD. Ketergantungan pada iuran orang tua dan jumlah

siswa menyebabkan ketidakstabilan finansial lembaga yang pada akhirnya berdampak langsung pada penghasilan guru. Hal ini sejalan dengan (Nuria & Aprilianti, 2023) yang menyatakan bahwa guru honorer sering menghadapi ketidakseimbangan antara beban kerja dan kompensasi yang diterima. Dengan demikian, permasalahan kesejahteraan guru tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengelolaan pendidikan yang belum optimal.

Lebih lanjut, kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan profesi guru PAUD di masa depan. Jika kesejahteraan tidak ditingkatkan, profesi ini dapat kehilangan daya tarik, terutama bagi generasi muda yang mempertimbangkan aspek ekonomi dalam memilih pekerjaan. Temuan ini memperkuat pendapat (Purba et al., 2024) bahwa kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru PAUD perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan.

2. Dedikasi dan Profesionalisme Guru dalam Keterbatasan

Meskipun berada dalam kondisi kesejahteraan yang rendah, guru PAUD tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Guru memandang profesinya sebagai panggilan hati dan bentuk pengabdian dalam mendidik anak usia dini. Hal ini tercermin dari komitmen guru dalam menyiapkan pembelajaran, hadir tepat waktu, serta mengikuti pelatihan yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang terbatas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh motivasi intrinsik dan nilai-nilai moral yang dimiliki. Guru PAUD cenderung memiliki orientasi kerja yang berbasis pengabdian sehingga tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan. Hal ini sejalan dengan (Sutiono, 2021) yang menyatakan bahwa profesionalisme guru mencakup komitmen, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, (Campbell, 2003) juga menegaskan bahwa etika profesi guru menjadi landasan dalam menjaga kualitas pendidikan.

Namun demikian, kondisi ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kesejahteraan guru. Ketergantungan pada dedikasi semata berpotensi menimbulkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi dalam jangka panjang. Temuan (Safitri & Ahyani, 2024) menunjukkan bahwa meskipun guru memiliki resiliensi yang tinggi, tekanan ekonomi tetap dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan pemenuhan kesejahteraan guru.

3. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pendidikan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh guru PAUD di daerah. Guru mengetahui adanya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tetapi pemahaman terhadap isi dan implementasinya masih terbatas (Indonesia, 2005). Selain itu, kebijakan yang ada belum mampu memberikan dampak signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil. Faktor seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta kondisi geografis menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan (Hidayat & Albab, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan kesejahteraan guru belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh mekanisme implementasinya.

Selain itu, bantuan pemerintah seperti BOP PAUD lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah daripada peningkatan kesejahteraan guru. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan guru sebagai pelaksana utama pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

4. Dampak Kesejahteraan terhadap Kualitas Pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak. Kesejahteraan yang rendah dapat memengaruhi fokus dan konsentrasi guru dalam mengajar. Guru yang menghadapi tekanan ekonomi cenderung memiliki beban pikiran yang dapat mengganggu kinerja profesionalnya. Sebaliknya, guru yang memiliki kesejahteraan yang baik akan lebih fokus, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tobondo & Putra, 2022) yang menyatakan bahwa kesejahteraan guru merupakan prasyarat dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Selain itu, (Fasya et al., 2024) juga menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pembelajaran. Dalam konteks PAUD, kualitas pembelajaran sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perkembangan anak. Guru yang memiliki kesejahteraan yang baik akan lebih mampu memberikan stimulasi yang optimal bagi anak, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun emosional.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan rendah, guru tetap berupaya memberikan pembelajaran yang terbaik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari guru dalam menjalankan tugasnya meskipun dalam kondisi yang terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran, meskipun faktor dedikasi dan komitmen juga berperan penting dalam menjaga kualitas pendidikan.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam mendukung profesionalisme dan kualitas pembelajaran (Oducado et al., 2024; Reyes, 2024). Selain itu,

penelitian ini juga menunjukkan bahwa etika profesi dan motivasi intrinsik memiliki peran penting dalam menjaga komitmen guru.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru PAUD, khususnya di daerah terpencil. Kebijakan yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu mencari strategi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti menjalin kerja sama dengan pihak lain atau mengembangkan sumber pendanaan tambahan.

5. Kondisi Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil

Kesejahteraan guru di daerah terpencil di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Banyak guru yang ditempatkan di wilayah terpencil harus menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun fasilitas kerja (Fasya et al., 2024). Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi dan kualitas kerja yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan pendidikan antara daerah terpencil dan perkotaan.

Secara ekonomi, tingkat kesejahteraan guru masih tergolong rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang diberikan. Gaji merupakan aspek utama dan paling mendasar dalam kesejahteraan seorang guru (Oktafiana et al., 2020). Banyak guru menerima gaji yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Gaji yang rendah juga mengakibatkan banyak guru mencari pekerjaan sampingan yang pada akhirnya mengurangi waktu dan energi mereka untuk fokus pada pengajaran. Ketidakpuasan terhadap gaji dapat menurunkan motivasi dan kinerja guru sehingga berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Selain aspek finansial, kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja guru di daerah terpencil juga sering kali tidak mendukung. Banyak guru yang tinggal di rumah dinas yang tidak layak huni, bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan harus menumpang di rumah warga.

6. Dampak Rendahnya Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil

Kesejahteraan secara umum merujuk pada terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup seseorang. Kesejahteraan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kesejahteraan material dan nonmaterial. Kesejahteraan material mencakup kekayaan fisik seperti uang dan barang berharga, sedangkan kesejahteraan nonmaterial berkaitan dengan kebutuhan batin, seperti rasa aman, kasih sayang, dan ketenangan jiwa (Oktafiana et al., 2020).

Kesejahteraan guru mencakup aspek material berupa penghasilan dan aspek nonmaterial yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai pendidik (Safitri & Ahyani, 2024). Kesejahteraan ini sangat penting bagi guru karena dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam menjalankan tugasnya. Dengan dukungan kesejahteraan yang memadai, diharapkan guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran (Devi et al., 2023). Selain itu, apabila profesinya

difasilitasi dengan baik, guru akan terdorong untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Kesejahteraan guru memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil yang penuh dengan tantangan. Ketika seorang guru merasa sejahtera secara ekonomi maupun psikologis, motivasinya dalam menjalankan tugas akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, ketidaksejahteraan sering kali membuat guru merasa kurang dihargai yang pada akhirnya berdampak pada semangat dan efektivitas dalam mengajar. Di daerah terpencil, yang akses terhadap fasilitas dasar masih terbatas, kebutuhan akan perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi semakin mendesak.

Rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama terkait gaji yang tidak mencukupi, dapat berdampak negatif pada motivasi dan kinerja mereka. Ketika guru merasa kurang dihargai dan tidak memperoleh kompensasi yang sepadan dengan kerja keras serta komitmen yang diberikan, semangat mengajar cenderung menurun. Kondisi ini dapat tercermin dari minimnya pembaruan dalam teknik mengajar, rendahnya keterlibatan dalam kegiatan peningkatan kompetensi, serta tingginya angka ketidakhadiran. Guru yang mengalami penurunan motivasi juga mungkin tidak memberikan perhatian optimal kepada siswa sehingga pada akhirnya memengaruhi kualitas proses pembelajaran (Ma'rifah, 2023).

Rendahnya kesejahteraan juga menyebabkan wilayah terpencil kurang diminati oleh tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak lulusan pendidikan lebih memilih mengajar di kota karena dianggap menawarkan kehidupan yang lebih layak. Kondisi ini memperparah ketimpangan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Anak-anak di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling terdampak karena harus belajar dengan fasilitas yang terbatas dan guru yang kurang mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan guru di daerah terpencil merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan pemerintah. Pemberian insentif khusus, peningkatan gaji, serta penyediaan fasilitas yang memadai akan menjadi bentuk nyata penghargaan atas pengabdian mereka. Ketika guru merasa dihargai dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka akan lebih fokus dan tulus dalam mendidik generasi penerus bangsa tanpa dibebani kekhawatiran terhadap kesejahteraan hidupnya.

7. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru

Pemerintah perlu menetapkan standar gaji yang layak dan sesuai dengan tanggung jawab guru, serta memberikan tunjangan dan insentif yang adil, terutama bagi mereka yang mengajar di wilayah terpencil atau tertinggal. Pemerintah juga harus memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Hal ini mencakup pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, serta laboratorium. Selain itu, akses internet yang memadai juga harus diprioritaskan (Hardianto et al., 2025).

Untuk menarik tenaga pendidik berkualitas ke daerah terpencil, pemerintah dapat memberikan tunjangan khusus, fasilitas tempat tinggal, dan peluang pengembangan karier. Program beasiswa bagi putra daerah yang ingin menjadi guru juga dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan

lokal dan menyediakan bahan ajar digital yang dapat diakses tanpa koneksi internet guna meningkatkan mutu pendidikan dan memperkecil kesenjangan informasi.

Kesejahteraan guru di daerah terpencil di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada mutu pendidikan (Ananda et al., 2025). Banyak guru harus menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan fasilitas kerja yang menurunkan motivasi dan kualitas kerja serta memperparah ketimpangan pendidikan dengan daerah perkotaan. Secara ekonomi, penghasilan guru masih jauh dari layak (Oktafiana et al., 2020), sehingga memaksa mereka mencari pekerjaan tambahan dan mengurangi fokus dalam mengajar. Kondisi ini berdampak negatif pada mutu pendidikan siswa.

Selain gaji, kondisi tempat tinggal dan fasilitas sekolah di wilayah terpencil juga sering kali tidak memadai (Kim, 2023). Banyak guru tinggal di rumah dinas yang tidak layak dan mengajar di sekolah dengan infrastruktur terbatas, seperti akses listrik, jalan, dan alat bantu pembelajaran. Meskipun demikian, sebagian guru tetap mengabdikan karena panggilan hati. Namun, pengabdian tersebut tidak seharusnya terus diuji oleh sistem yang kurang berpihak kepada guru. Kesejahteraan guru mencakup aspek material dan nonmaterial yang penting untuk mendukung motivasi, kompetensi, dan mutu pembelajaran (Devi et al., 2023). Ketidakejahteraan dapat mengurangi semangat, keterlibatan dalam pelatihan, dan efektivitas mengajar (Ma'rifah, 2023). Tantangan geografis juga memperberat beban kerja guru di daerah terpencil serta menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Lestari & Novianti, 2025). Minimnya kesejahteraan mendorong guru mencari pekerjaan tambahan sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Tanpa pelatihan yang memadai, guru juga kesulitan beradaptasi dengan tantangan lokal (Martinez & Chang, 2021). Dampak rendahnya kesejahteraan guru meluas hingga kepada siswa dan masyarakat. Siswa menjadi terhambat dalam mengembangkan potensinya, sedangkan masyarakat kehilangan generasi yang produktif (Rumtini, 2014). Kurangnya tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil juga memperparah ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

E. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAUD di TK Nagari Koto Anau Tapan masih berada pada tingkat yang rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, yang terlihat dari besaran gaji yang terbatas serta ketergantungan pada kondisi keuangan lembaga. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi individu, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan pendidikan PAUD, khususnya di daerah terpencil. Meskipun demikian, guru tetap menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya yang didorong oleh motivasi intrinsik, komitmen moral, serta nilai-nilai etika profesi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan profesionalisme yang tinggi dan dukungan kesejahteraan yang masih terbatas.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara regulasi pendidikan, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dan implementasinya di lapangan, di mana manfaat kebijakan belum dirasakan secara optimal oleh guru PAUD, terutama yang berstatus honorer di daerah. Kesejahteraan guru juga terbukti memiliki keterkaitan dengan kualitas pembelajaran, di mana kondisi ekonomi yang lebih baik dapat mendukung kinerja dan fokus guru dalam mengajar. Meskipun demikian, dalam penelitian ini dedikasi guru tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan guru PAUD, khususnya di daerah terpencil, agar tercipta keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan dukungan kesejahteraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., Khairani, M., Putri, N. A. A., Anggraini, T., & Pratiwi, N. (2025). Analisis kompetensi dan ketersediaan tenaga kependidikan sekolah dasar di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 391–401.
- Aulia, N. R., Shodiqoh, E. L., & Cahyaningrum, S. P. (2023). Analisis kebijakan kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. *Basa Journal of Language & Literature*. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>
- Bank, W. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank.
- Campbell, E. (2003). *The ethical teacher*. Open University Press.
- Devi, I., Sesmiarni, Z., Syafitri, A., Simbolon, A. M. Y., & Iswantir. (2023). Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di MTsS Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 14422–14433.
- Eliza, D., Sardi, M., Amalia, W., & Karmila, D. (2022). Jenis-jenis pelatihan peningkatan profesional guru PAUD di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6836–6843. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3323>
- Fasya, G. N. S., Surana, D., & Afrianti, N. (2024). Pengaruh kesejahteraan guru terhadap kinerja guru pendidikan anak usia dini di Kecamatan Buah Batu. *Bandung Conference Series: Early Childhood Teacher Education*, 4(1), 153–158. <https://doi.org/10.29313/bcsecte.v4i1.10328>
- Fatria, M., Corrina, F., & Zulammar, Z. (2022). The importance of teacher welfare improvement. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.34006/jmbi.v11i2.519>

- Hardinanto, E., Faizi, A., Prihatin, Y., Diastuti, I. M., Rizal, M. F., & Nugraha, A. S. (2025). Peningkatan kemampuan *meta level reflection* dan *critical thinking* pada guru di MTs Al-Amin. *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)*, 9, 522–530.
- Hidayat, F. N., & Albab, U. (2023). Analisis kebijakan kesejahteraan guru PAUD dalam meningkatkan kualitas guru lingkungan Dikdisbud Situbondo. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.25139/smia.v1i2.5900>
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia, R. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Jamil, J. (2022). *Etika profesi guru*. CV. Azka Pustaka.
- Julaiha, S., Ramli, A., Oktaviany, V., Sudadi, S., Malik, L. R., & Anwar, H. (2023). Analisis pengaruh manajemen pendidikan terhadap motivasi belajar pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4507>
- Kim, H. (2023). Multicultural curriculum development. *Multicultural Education Review*, 11(4), 78–92. <https://doi.org/10.6789/mer.v11i4.6789>
- Lestari, A. N. G., Sumantri, M. S., & Dhieni, N. (2022). Development of early childhood education teacher competency: Reviewed from perception and teacher's motivation. *Jurnal Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.33394/jk.v8i2.5145>
- Lestari, D. A., & Novianti, Y. (2025). Dampak kesejahteraan guru di wilayah terpencil dalam menangani ketimpangan pendidikan. *Jurnal Berbasis Sosial*, 6(1), 30–38.
- Ma'rifah, I. Z. (2023). Pengaruh motivasi kerja dan kesejahteraan guru terhadap kinerja guru MI di Kecamatan Jekulo. *QUALITY*, 11(2), 293–316.
- Martinez, L., & Chang, K. (2021). Assessing the efficacy of virtual classrooms. *Computers & Education*, 157, 104002. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104002>
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Mia, Y. G., & Sulastri, S. (2023). Analisis kompetensi profesional guru. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 49–55. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.84>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Na'imah, T., Kasanah, R., & Rahmasari Aeni, P. S. (2021). Systematic review on the factors that influence well-being among teachers. *Sains Humanika*, 13(2–3). <https://doi.org/10.11113/sh.v13n2-3.1917>

- Nuria, R., & Aprilianti, R. (2023). Problematika beban kerja guru honorer di taman kanak-kanak. *JESA: Jurnal Edukasi Sebelas April*, 7(2), 135–145. <https://doi.org/10.25157/jesa.v7i2.10732>
- Oducado, R. M., Amboy, M. K. Q., Robles, B. R., Rosano, D., Montaña, H. C., Temelo, D. R., & Tamdang, K. (2024). Demographics and job satisfaction as predictors of mental well-being of teachers. *International Journal of Educational Research and Innovation*. <https://doi.org/10.46661/ijeri.8205>
- Oktafiana, R., Fathiyani, F., & Musdalifah, M. (2020). Kebijakan kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(3).
- Purba, D. P., Dita, D. M., Vivaldy, J. A., Purba, J. F., Simanjuntak, S., & Bangun, M. B. (2024). A literature review of dynamics teacher welfare in Indonesia. *Paedagogi: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 10(2). <https://doi.org/10.24114/paedagogi.v10i2.64464>
- Reyes, J. V. (2024). Fostering teacher welfare and well-being: Evaluating the school's continuous professional development program. *International Journal of Research Publications*. <https://doi.org/10.47119/ijrp1001521720246896>
- Rumtini, R. (2014). Dampak peningkatan kesejahteraan guru terhadap mutu peminat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 211–222.
- Safitri, W., & Ahyani, L. N. (2024). Resiliensi pada guru PAUD honorer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2281–2301. <https://doi.org/10.47467/assyari.v6i2.6590>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutiono, D. (2021). Profesionalisme guru. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 16–25. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1437>
- Tobondo, Y., & Putra, S. (2022). Kesejahteraan guru sebagai prasyarat lingkungan belajar berkualitas. *Pandelo'e*, 2(2), 12–24. <https://doi.org/10.37195/pand.v2i2.120>
- UNESCO. (2015). *Education for all 2000–2015: Achievements and challenges*. UNESCO Publishing.